

ISLAM PRIANGAN, KEKUASAAN DAN AJENGAN

Catatan Awal atas *Action Research* Gerakan Perempuan¹



Mahrus eL-Mawa
Peneliti di Rahima Jakarta
dan P3M STAIN Cirebon

Banten sudah lama ‘dijajah’ Priangan”, ungkap seorang tokoh asal Banten saat menghadiri Seminar “Pembentukan Provinsi Banten” di Jakarta empat tahun silam.² Sesungguhnya, wilayah Priangan³ sendiri, menurut sejarahnya, dulu pernah “dijajah” kerajaan Islam (kesultanan) Jawa Mataram. Saat itu, Mataram ingin menghancurkan

Batavia dari kekuasaan VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*). Mula-mula yang menyerah adalah daerah Priangan Timur⁴, yaitu Galuh pada tahun 1595, lalu diikuti Sumedanglarang pada tahun 1620-an. Jatuhnya Sumedanglarang berarti jatuhnya seluruh wilayah Priangan ke tangan Mataram.⁵

Selain Mataram, 20-an tahun sebelumnya, Banten juga telah menaklukkan Pakuan, ibukota kerajaan Sunda Pajajaran pada tahun 1579. Dengan tekuk-lutunya Pakuan, berakhir sudah kerajaan Hindu di Jawa Barat. Ketika itu, Banten menjadi kerajaan Islam (Kesultanan) yang tak tertandingi, kecuali oleh Mataram. Hal ini diketahui, saat Mataram melakukan ekspansi ke ‘mancanegara Barat’ pada dekade XVII yang ternyata Banten tidak dapat ditaklukkan.⁶

Invasi orang Mataram yang berlangsung setengah abad ternyata cukup berpengaruh di Priangan. Peradaban Jawa kuat sekali pengaruhnya pada menak⁷ Priangan. Antara lain adalah budaya

¹Riset aksi (*action research*) gerakan perempuan telah dilakukan tim Rahima. Wilayah aksinya di Tasikmalaya dan Garut selama tahun 2002-2004, lalu Cianjur dan Banten pada tahun 2003-2004. *Action research* merupakan bagian dari upaya kita memahami secara sistematis fenomena yang tengah terjadi dan langsung mengaitkannya dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi aksi. Jadi bukan penelitian (yang sekedar akan diterbitkan) sebagai penelitian akademis tentang sebuah fenomena yang dilakukan secara mendalam. Sebagaimana diungkap Kamala Chandra Kirana (Mbak Nana), saat menjadi pembahas Seminar Nasional Perempuan dalam Arus Formalisasi Syari’at Islam (Belakar dari Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Banten), 26 April 2004 di Jakarta.

feodal-patriarkhal. Pengaruh Jawa yang kuat juga menimpa pada pondok pesantren. Hingga abad XIX, pesantren di Jawa Barat tidak menggunakan bahasa wilayah mereka sendiri, tetapi menggunakan bahasa Jawa sebagai medium pendidikan. Jika teks-teks Arab perlu diterjemahkan, maka terjemahannya menggunakan bahasa Jawa.⁸

*Ngalogat*⁹ Sunda di pondok pesantren baru dipakai sekitar tahun 1900-an. *Ajengan*¹⁰ Ahmad Syuja'i dari pesantren Gudang Tasikmalaya diduga sebagai

perintisnya. Penuturan *Ajengan Ilyas Ruhiat* bisa menjadi pembenarannya;

“Setelah membuka pesantren Cipasung tahun 1931, ayah saya (*Ajengan Ruhiat*) menggunakan bahasa Sunda. Setelah itu menyebar ke berbagai wilayah Jawa Barat. Saya termasuk santri yang tidak diajari *ngalogat* Jawa, karena belajar langsung dari ayah sendiri yang sudah menggunakan bahasa Sunda”.¹¹

Ajengan Ruhiat dikenal sebagai pelopor yang gigih dalam penggunaan bahasa

***Hatur nuhun* kepada semua pihak yang telah membantu tulisan sederhana dan “tergesa-gesa” ini. Semoga ada manfaat yang dapat diambil di dalamnya.

² Seperti dicatat Nina Herlina Lubis, staf pengajar pada Universitas Padjadjaran Bandung, yang juga narasumber pada Seminar “Pembentukan Provinsi Banten” tanggal 21 Maret 2000 di Jakarta. Lihat, Nina Herlina Lubis, “Latar Belakang Berdirinya Provinsi Banten”, dalam Edi Sedyawati dan Susanto Zuhdi, *Arung Samudra: Persembahkan memperingati Sembilan Windu A.B. Lapijan*, (Depok: PPKBLPUI, 2001), hlm. 471.

³ Priangan adalah salah satu wilayah Keresidenan di Jawa Barat. Ada 5 (lima) Wilayah Keresidenan di Jabar; Wilayah I Keresidenan Banten (Kab. Serang, Kab. Pandeglang, Kota dan Kab. Tangerang, Kota Cilegon dan Kab. Lebak), Wilayah II Keresidenan Bogor (Kota dan Kab. Bogor, Kota dan Kab. Sukabumi, dan Kota Depok), Wilayah III Keresidenan Cirebon (Kota dan Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, dan Kab. Indramayu), Wilayah IV Purwakarta (Kab. Purwakarta, Kota dan Kab. Bekasi, Kab. Subang, dan Kab. Karawang), dan Wilayah V Priangan (Kota dan Kab. Bandung, Kota dan Kab. Tasikmalaya, Kab. Sumedang, Kab. Banjar, Kab. Ciamis, dan Kab. Garut).

⁴ Yang termasuk Priangan Timur adalah Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.

⁵ Nina., *op. cit.*, hlm. 469

⁶ Khatib Mansur, *Perjuangan Rakyat Banten Menuju Provinsi: Catatan Kesaksian Seorang Wartawan*, (Jakarta: LKBN Antara, 2001), hlm. 19-20.

⁷ *Menak* adalah orang terhormat; bangsawan; ningrat; priyayi. Pada saat itu, *menak* sangat berpengaruh di masyarakat Priangan.

⁸ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 144.

⁹ *Ngalogat*, seperti yang dipraktekkan, berarti mengartikan kata per kata dari teks Arab (kitab kuning) dengan cara menuliskannya tepat di bawah kata yang dimaksud dengan huruf Arab. Jika memakai bahasa Sunda, namanya *ngalogat* Sunda, bila bahasa Jawa, *ngalogat* Jawa, dst.

¹⁰ *Ajengan* adalah sebutan untuk kyai di tanah Pasundan.

¹¹ Obrolan santai dengan Iip Dzulkifli Yahya, 27/07/2001. Lihat juga dalam Iip Dz. Y., “Tasikmalaya Sebagai Kota Relegius: *Ngawangun* atau *Ngalamun*?”, *Makalah Seminar Nasional Menggagas Masa Depan Tasikmalaya Menuju Masyarakat Madani*, tanggal 27-28 Juli 2001.

Sunda di pesantren Priangan.

Selain mengangkat bahasa Sunda sebagai bahasa pesantren, Ajengan Ruhiat juga melakukan pembongkaran tradisi patriarkhal. Yang dilakukannya adalah mengkader santri putri untuk menjadi ulama. Salah seorang santri ajengan Ruhiat yang berhasil memimpin pesantren dan menyebarkan ilmunya adalah Nonoh Hasanah (1938-1986). Hj. Nonoh bersama KH. Ahmad, suaminya, pada 25 Desember 1959 mulai meneruskan pondok pesantren Cintapada, yang telah didirikan mertuanya, tapi sudah lama tidak berfungsi. Berbeda dengan sang mertua, pesantren ini hanya menerima santri putri dengan nama pondok pesantren putri al-Hasanah Cintapada di Cibeurem Tasikmalaya.¹² Adapun santri putri ajengan Ruhiat yang sukses dalam ilmu-ilmu keislaman pesantren lainnya adalah Hj. Sua (1930-1996).¹³ Kedua santri ini pernah menjadi asisten ajengan Ruhiat. Tentu saja, kebijakan ajengan Ruhiat menimbulkan kontroversi pada saat itu.

Oleh kalangan aktivis gerakan,

terutama jaringan kajian Islam dan advokasi perempuan di Tasikmalaya, dua tokoh perempuan tersebut menjadi inspirasi historis bagi gerakan perempuan Tasikmalaya.¹⁴ Dengan latar sosial dan budaya Priangan demikian, bahasan berikutnya adalah sekitar pencarian akar sejarah Islam di Jawa (Sunda) hingga pengaruh reformasi 1998. Terakhir, analisis reflektif akan difokuskan pada gerakan perempuan di tatar Priangan (Sunda) sembari menawarkan beberapa ide alternatif sesuai lokalitasnya.

Islam di Jawa (Barat, Sunda): Akar Tak Berujung?

Menurut Drews, daerah-daerah kantong masyarakat Islam di pulau Jawa muncul menjelang akhir abad ke-13. Namun, kemajuan Islam yang penting baru dimulai sejak setelah datangnya para pedagang muslim dari India sekitar tahun 1400, yakni ketika kota-kota Islam, seperti Demak, Jepara, Tuban, dan Surabaya muncul di sepanjang pantai utara Jawa. Di Jawa Barat berdiri dua kesultanan, yaitu Banten pada tahun 1520 dan

¹²Sebagaimana dituturkan Wiwi Siti Sajarah, pengajar UIN Jakarta yang berasal dari Tasikmalaya pada diskusi reguler di Tasikmalaya, Agustus 2003. Lihat juga, Wiwi Siti Sajarah, "Hj. Nonoh Hasanah: Perintis Pesantren Putri di Jawa Barat", dalam Jajat Burhanudin (edit.), *Ulama Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 357-358.

¹³Menurut Hj. Djuju Zubaidah, salah seorang putri Hj. Sua, Hj. Sua adalah santri putri pertama dari KH Ruhiat. Berarti lebih senior dibanding dengan Hj. Nonoh. Selain menjadi asisten Ajengan Ruhiat, Hj Sua juga mendapat otoritas untuk mengajarkan 'ilmu alat' di asrama putri yang dibangunnya dekat dengan pesantren Cipasung. Seperti diceritakan Ibu Djuju dalam diskusi reguler bersama Wiwi S. Sajarah.

¹⁴Sebagaimana dituturkan para aktivis, saat monitoring di Gunung Saung Eurih Tasikmalaya, Mei 2004.

Cirebon pada tahun 1527¹⁵, dengan bantuan kesultanan Demak.

Islam di Sunda lebih banyak dihadirkan melalui invasi militer bukan melalui pedagang. Agama sebelumnya, Hindu Pakuan dikalahkan oleh Islam Banten. Di Priangan oleh Islam Mataram¹⁶. Namun, tidak demikian halnya dengan Cianjur sebagai bagian tatar Sunda. Menurut *Riwayat Dalem Cikundul*, putra mahkota Prabu Siliwangi secara diam-diam telah mempelajari Islam melalui pengikut Sultan Syarif Hidayatullah dari Cirebon. Dari riwayat ini juga disebutkan bahwa Cikundul adalah asal-muasal Cianjur dan tidak pernah dijajah Mataram maupun VOC.¹⁷

Sementara asal-muasal Islam di Garut, oleh masyarakatnya dipahami melalui dua jalur, *pertama*, teori yang diambil dari data arkeologi Gadok (Pameungpeuk, pantai selatan Garut). Menurut jalur ini, Islam

datang dibawa H. Mansur, yang lebih dikenal dengan Prabu Kiansantang¹⁸ melalui Sukabumi dan Cianjur, lalu sampai ke Hutan Sancang Pameungpeuk Garut. Dan jalur *kedua*, melalui orang kepercayaan Syarif Hidayatullah¹⁹, Pangeran Muhammad²⁰ dari Palarakan yang menyebarkan Islam di Sumedanglarang hingga ke Garut.

Dari kedua jalur tersebut, nampaknya lebih kuat pada jalur pertama. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa jejak-jejak Prabu Kiansantang lebih kuat, seperti keberadaan daerah "Suci". Diyakini oleh masyarakat, tempat itulah sebagai pusat penyebaran agama Islam di Garut oleh Prabu Kiansantang. Dan tidak jauh dari daerah itu ada makam Prabu Kiansantang, di desa Godog, lereng gunung Karacak Garut.²¹

Nampaknya, pribumisasi Islam, meminjam istilah Abdurrahman Wahid, telah

¹⁵Kesultanan Banten dibentuk atas perintah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Djati yang berkedudukan di Cirebon. Menurut catatan Khotib Mansur, 8 Oktober 1526 kadipaten Banten berdiri di Surasowan, lalu setelah mendapatkan gelar pangeran, Maulana Hasanudin menikah dengan puteri Sultan Trenggana, Nyi Mas Ayu Kirana, dan dinobatkan menjadi Sultan pertama di Banten oleh Sultan Demak tahun 1552.

¹⁶Menurut buku-buku sejarah penyebaran Islam di Jawa Barat dimulai sesudah Pajajaran jatuh oleh kesultanan Cirebon pada tahun 1579. Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 15

¹⁷Yusup Supiani, *Riwayat Singkat Dalem Cikundul R. Aria Wiratanu Datar*, (Cikundul, 1998), cet. II. Tetapi, hal ini berbeda dengan keputusan DPRD kab. Cianjur saat sidang pleno, 10 Juli 1982 untuk menentukan hari Jadi Cianjur, 12 Juli 1677. Bedanya, karena dianggap Cianjur telah dijajah Mataram pada masa Sultan Amangkurat I. Dan lepas dari Mataram tanggal 2 Juli 1677, di mana baru sampai ke Cianjur 10 hari kemudian.

¹⁸Putra Prabu Siliwangi, raja Kerajaan Pajajaran yang beribu kota di Pakuan Bogor.

¹⁹Cucu Prabu Siliwangi dan keponakan Prabu Kiansantang.

²⁰Putra Matangsari, atau cucu dari Prabu Susuk Tunggal.

²¹Tim peneliti Forum Pangirutan, "Perempuan dalam Arus Formalisasi Syariat Islam di Garut", *Makalah Seminar Nasional Perempuan dalam Arus*, *op. cit.*

merasuk dalam budaya dan hati *menak* serta masyarakat Priangan. Seperti diakui Hiroko Horikoshi, peneliti asal Jepang saat riset di Jawa Barat, bahwa anak-anak Raja Pajajaran beberapa menjadi ulama dan *penghulu*.²² Perkembangan ini terjadi setelah gagalnya kerajaan Sunda Pajajaran menegakkan kekuasaan parokial semi-independen di daerah-daerah pegunungan, yang secara resmi masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Penyebaran Islam di Priangan juga telah dibantu oleh praktek-praktek poligami di antara para ulama dan perkawinan matrilokal di antara penduduk setempat.²³

Namun perlu dicatat, pribumisasi Islam bukanlah Jawanisasi atau sinkretisme, sebab ia hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Begitupun dengan norma dan budaya.²⁴ Kebetulan saja, budaya Jawa yang masuk ke budaya Sunda (Priangan) cukup berpengaruh.

Dalam konteks Tasikmalaya, misalnya, dapat bercermin dan merujuk masa Wiradadaha III (1674-1723). Masa pemerintahan *Dalem Sawidak* ini disebut sebagai era keemasan kabupaten Sukapura (Tasikmalaya), semisal suksesnya pengaturan bidang kesejahteraan dan

keamanan. Pada sisi lain, kemajuan agama Islam juga berlangsung sangat baik berkat kegigihan Syekh Abdul Muhyi, ulama yang membantu misi Sunan Gunung Djati, dengan pusat perguruanannya di Karang, Pamijahan. Antara keduanya tidak saling intervensi. Bahkan, putranya yang akan menggantikan posisi Bupati (Wiradadaha IV) dikirim untuk belajar di Pamijahan. Di sinilah muncul pemerintahan yang menyejahterakan rakyatnya, di bawah bimbingan ruhani ulama. Ulamanya sendiri tetap independen atas kekuasaan seraya berkonsentrasi membangun ruhani masyarakat.

Realitas historis Syekh Abdul Muhyi dan kekuasaan inilah sebenarnya yang menjadi acuan generasi Priangan saat ini. Karenanya, di tengah euforia reformasi tahun 1998, berbagai gerakan kaum muda mencoba memperjuangkan agar ajaran Islam (syari'at Islam) dapat ditempatkan pada posisi yang proporsional. Sehingga, diharapkan para ajengan melalui pondok pesantrennya, tidak melakukan politisasi agama. Termasuk para politisi dan kaum birokrat.

Namun begitu, di Priangan juga telah menorehkan sejarah Islam yang lain; DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin S.M. Kartosuwiryo. Awalnya adalah Gerakan Institut Sufah,

²²*Penghulu*, titel yang diberikan Pemerintah Belanda terhadap pengelola masjid tertinggi di tingkat Kabupaten, Kecamatan, atau Kelurahan.

²³Hiroko, *op. cit.*, hlm.38.

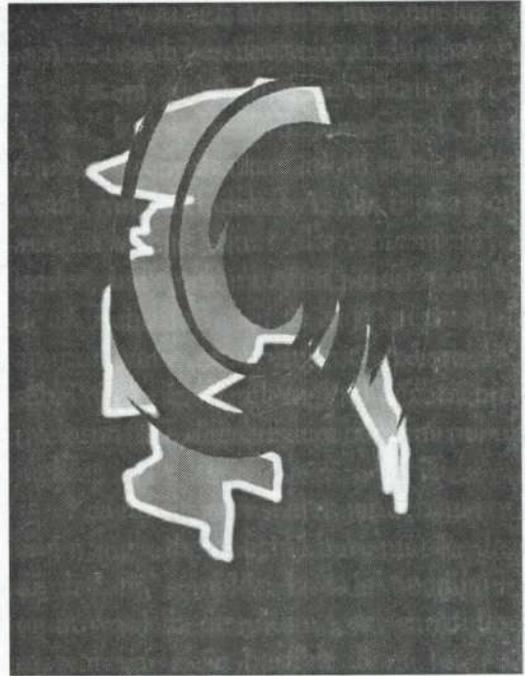
²⁴Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam", dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im S. (penyunt), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989), hlm. 83.

pada saat Belanda menguasai Garut. Lalu, pada masa Jepang menjadi Perguruan Suffah, Kartosuwiryo sebagai pendirinya. Perguruan inilah yang dijadikan sebagai pusat latihan kemiliteran bagi pemuda-pemuda Islam, khususnya Hizbullah dan Sabilillah.

Benih DI/TII berasal dari perpecahan dalam tubuh PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), yaitu Komite Pembela Kebenaran PSII. Perpecahan itu karena perbedaan paham antara Kartosuwiryo dengan pengikut-pengikutnya. Pada bulan Februari 1948 di Cisayong diselenggarakan konferensi. Di antara keputusannya, mengubah ideologi Islam dari bentuk kepertaian menjadi bentuk kenegaraan, membekukan Masyumi Jawa Barat, dan mengangkat Kartosuwiryo menjadi Imam seluruh umat Islam Jawa Barat. Selang beberapa hari, dibentuk Tentara Islam Indonesia (TII).²⁵

Mantan aktivis atau sanak keluarga DI/TII, hingga kini masih hidup di berbagai daerah Jawa Barat dan Banten, termasuk beberapa pengasuh pondok pesantren. Salah seorang pengasuh pesantren yang mendukung formalisasi Syari'at Islam, berseloroh pada saya, bahwa dirinya masih ada darah Kartosuwiryo.

Demikian beberapa akar belukar sejarah Islam dalam masyarakat Sunda (Jawa Barat). Bila ditilik sekilas, nampak-



nya yang agak dominan asal-usul ajaran Islam yang berkembang berasal dari ajaran yang disampaikan Syarif Hidayatullah Cirebon dengan berbagai modelnya, seperti yang dilakukan juga oleh para pengikutnya. Barangkali, hal ini seperti disinyalir dalam *Babad Banten* bahwa negeri Cirebon (*garage*) adalah puser bumi, dari seluruh daerah Sunda.²⁶

Ghirah Ajengan dan Syari'at Islam di Tampuk Kekuasaan

Statemen orang Banten di awal tulisan, tentu saja sudah menjadi masa lalu. Ketika Banten masih menjadi bagian Jawa

²⁵Konferensi berikutnya dilaksanakan di Cijoho, Karangpawitan Garut pada bulan Mei 1948 untuk menyusun suatu ketatanegaraan Islam. Pada tanggal 7 Agustus 1949, diproklamasikan "Negara Islam Indonesia". Tim peneliti Forum Pangirutan, *op. cit.*

²⁶Seperti dikutip oleh Khatib Mansur, *op. cit.*, hlm. 18.

Barat, pemerintah provinsi Jabar dianggap kurang memperhatikan pembangunan daerah Banten. Padahal Pemprov Jabar diuntungkan dengan PAD (pendapatan asli daerah) Banten.²⁷ Walaupun, alasan semacam ini ditampik oleh H. Tb. Chasan Sochib sebagai sesepuh Banten.²⁸ Jika sekarang masih banyak pejabat Pemda Banten berasal dari Priangan, berarti pernyataan itu (mungkin) masih relevan, sekalipun warga Banten (juga) ikhlas menerimanya.

Dari catatan Nina Herlina Lubis, sebenarnya usaha masyarakat Banten untuk menjadi provinsi sudah dimulai sejak tahun 1953. Usaha pertama ini gagal, lalu tahun 1964, juga gagal. Setelah lahir Pemerintah Orde Baru, mereka mencoba lagi pada tahun 1970-an tetapi gagal lagi.²⁹ Saat Suharto *lengser*, ikhtiar memisahkan dari Jawa Barat dimulai lagi. Akhirnya, Banten berhasil. Kini, Banten telah “merdeka” dan menjadi provinsi ke-30 di Indonesia pada tahun 2000.³⁰ Ia

bukan lagi bagian dari Sunda atau Jawa Barat. Tetapi, ia bagian dari NKRI yang di dalamnya ada orang Sunda, Badui³¹, Jawa, Cirebon, dst.

Fenomena pergeseran paradigma kebangsaan dan keberagamaan pasca 1998, nampaknya terjadi berbagai daerah di Indonesia. Di Jawa Barat sendiri, terdapat pergolakan yang cukup signifikan, seperti Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Adapun beberapa daerah Priangan, Sunda atau Jawa Barat lainnya, Ciamis, Indramayu dan Sukabumi, melakukan hal serupa, hanya saja suaranya sayup-sayup saja.

Daerah-daerah tersebut sebagian besar menghendaki syari’at Islam diterapkan secara formal dalam pemerintahan. Sedikitnya, penerapan itu diperuntukkan bagi lingkungan birokrasi Pemda yang beragama Islam. Untuk itulah diperlukan surat himbauan, anjuran, edaran, keputusan, dan pemberitahuan.³² Keberanian para politisi dan birokrat daerah tersebut

²⁷Nina Herlina Lubis, *op. cit.*, hlm. 472

²⁸Tb. Hasan Sochib adalah koordinator pada saat Tur Silaturahmi Mohon Do’a Restu Masyarakat wilayah Banten ke saudaranya se-wilayah Jabar, tanggal 20-23 Juni 2000, sebelum menjadi Provinsi. Adapun kronologi perjuangannya, dapat dilihat dalam, Khatib Mansur, *Perjuangan Rakyat Banten Menuju Provinsi: Catatan Kesaksian Seorang Wartawan*, (Jakarta: LKBN Antara, 2001)

²⁹Nina., *op. cit.*

³⁰Tepatnya, 18 Nopember 2000. Sebagaimana dalam amanat UU Nomor 23 Tahun 2000, tertanggal 17 Oktober 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten.

³¹Badui ini, konon pengikut Raja Pajajaran Hindu Pakuan yang dapat lepas dari invasi Mataram dan Banten.

³²Beberapa aturan yang mucul; berpakaian muslim (bagi perempuan memakai baju muslimah, “Wajib jilbab”, bagi lelaki baju koko), sholat dhuhur berjama’ah, kolam renang harus dipisah antara lelaki dan perempuan, sertifikasi/ijazah madrasah diniyah sebagai syarat melanjutkan studi, dst. Karena masih bersifat anjuran, jika dikritisi maka akan dianggap sebagai *entry point* untuk menolak penerapan Syari’at Islam. Seperti diberitakan *Sabili*, 22 Th. XI, 21 Mei 2004. Nampaknya, *Sabili* kurang cermat melihat persoalan yang digagas. Catatatnya adalah *opression*, pemaksaan. Bila tidak memaksa, *why not?* Jadi, apa

muncul karena mendapat dukungan dari beberapa ajengan setempat.

Alasan bahwa para ajengan penting untuk dilibatkan dalam kebijakan pemerintah antara lain: *Pertama*, daerah-daerah tersebut dianggap sebagai kota santri. Indikator sebagai kota santri adalah menjamurnya tempat ibadah umat Islam, masjid ataupun musholla/langgar. Selain tempat ibadah, juga pondok pesantren sebagai basis pendidikan dan pengajaran Islam di masyarakat. Bahkan, organisasi atau kelompok keagamaan Islam yang bersifat nasional ataupun lokal juga banyak tersebar sampai di pelosok-pelosok desa. Semuanya itu diasuh oleh ajengan. Jadi, ajengan masih mempunyai pengaruh yang besar dan kuat, karena mereka telah mendidik, mengajar, membimbing, dan memberikan *uswah* (baca: rasa aman). Ajengan Khaer Affandi (Manonjaya), KH. Anwar Musaddad (Garut), dan KH. Ruhiat (Singaparna) merupakan tokoh agama yang telah melahirkan dan menebarkan para santrinya di seluruh wilayah Priangan.

Kedua, dari sisi sosio-historis, setelah raibnya kerajaan Hindu Pajajaran, terdesak oleh umat Islam, pemimpin yang berani melawan penjajah (Belanda, Portugis, dan Jepang) adalah para kyai (ajengan) dari pondok pesantren. Untuk menyebut soal ini, misalnya peran besar KH. Ruhiat dan KH. Zaenal Musthafa (Singaparna) saat peristiwa perlawanan di Sukamanah pada tahun 1944. Lalu, dalam

konteks hubungan antar umat beragama, khususnya pasca kerusuhan dalam euforia reformasi beberapa tahun silam, ajengan sebagai pemimpin agama juga sangat penting kedudukannya. FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) di Tasikmalaya, misalnya dipimpin oleh ajengan. Hal serupa juga terjadi di Garut, pada saat terjadi sengketa tanah antara Gereja dengan umat Islam. Dalam penyelesaian kasus ini, yang menjadi mediator strategisnya adalah ajengan. Demikian pula, bila ada kerusuhan sosial atau yang terkait dengan partai politik dan Pemilu.

Ketiga, sebelum menjabat Bupati atau menetapkan peraturan-peraturan daerah, telah ada kesepakatan politik yang berisi agenda formalisasi syari'at. Artinya, kedua belah pihak telah melakukan kontrak politik. Kontrak ini seringkali kurang mempertimbangkan dampak negatif yang akan muncul terkait dengan keragaman (pluralitas) masyarakatnya, baik dari segi keyakinan, etnis, agama, kelas sosial, dst.

Dari dua alasan pertama, sebenarnya tidak ada masalah. Kecuali, bila terjadi politisasi tokoh, dst.. Tetapi bila alasan ketiga yang lebih dominan, maka akan menimbulkan banyak masalah. *Pertama*, jika peraturan itu tidak sesuai dengan nilai Islam yang universal (kemanusiaan, keadilan, kesetaraan) dan untuk kemaslahatan, maka akan ada orang yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil.

yang telah dilakukan kawan-kawan di daerah adalah upaya antisipasi, minimal mengingatkan.

Soal syari'at Islam misalnya, meskipun saat ini masih bersifat anjuran, himbauan, dst. tetapi sudah menimbulkan "ketakutan" bukan keikhlasan. Sebab, bila tidak mengindahkan akan ada sanksi sosial yang didapat.³³ Apalagi, jika peraturan yang dibuat akan mempunyai sanksi, baik pidana atau perdata, maka demi keadilan, tentu saja peraturan apapun yang menyangkut soal publik, sebaiknya dipertimbangkan secara menyeluruh, dan didiskusikan bersama publik juga.

Kedua, eksistensi ajengan sebagai orang yang dihormati, kharismatik, dan diteladani, semakin lama akan dijauhi umatnya. Bila demikian, para santri dan masyarakat akan berfikir ulang tentang fungsi yang sebenarnya dari ajengan sebagai wakil para Nabi (*al-'ulama' waratsah al-anbiya'*).

Seyogyanya, niat agar syari'at Islam diformalkan dalam bingkai kekuasaan sudah saatnya dipertanyakan kembali, bila tidak secepatnya dicabut. Beberapa ajengan yang ingin terlibat langsung dalam keputusan pemerintah di Priangan ini, lebih baik masuk dalam birokrasi. Seyogyanya, para ajengan dapat mengambil hikmah dari Syekh Muhyi yang diuraikan di atas. Hal yang sama bisa saja mengikuti Kartosuwiryo, dengan segala konsekuensinya. Asalkan, gerakannya

tidak menggunakan kekerasan. Jadi, demokratisasi akan berlangsung tanpa ada darah dan kematian umat manusia.

Gerakan Perempuan: Kelompok Pembaharu Islam dan Perubahan Sosial

Pelajaran penting dari Islam Priangan seperti diuraikan di atas adalah makna kesetaraan gender. Apa yang telah dilakukan Ajengan Ruhiat kepada Hj. Sua dan Hj. Nonoh menunjukkan bahwa ia tidak terpengaruh oleh budaya Jawa yang feodal-patriarkhal dan telah mengakar di Sunda (Priangan). Meskipun nilai egaliter budaya (Priangan) telah nyaris punah seiring dengan pendudukan Mataram sehingga budaya Banten masih lebih egaliter dibanding Priangan.

Semangat Ajengan Ruhiat untuk melakukan *empowerment* terhadap kaum perempuan menyemangati beberapa pihak untuk melakukan gerakan pemberdayaan perempuan di Priangan. Berawal dari berbagai keterbatasan, saat ini gerakan tersebut telah sampai pada capaian yang membanggakan. Pada tahun 2002, saya beranjangsana ke rumah Hj. Djuju. Saya bertanya kepada beliau—sebagai salah seorang aktifis perempuan yang berdomisili di Pesantren—, apakah kenal dengan LKaHAM³⁴? Spontan dijawab, "tidak". Sembari menjelaskan

³³Seperti pertemuan kami dengan salah seorang non-muslim, mereka merasa risau dan takut. Begitupun dengan beberapa orang dari Pemda sendiri.

³⁴LKaHAM: Lembaga Kajian Agama dan Hak Asasi Manusia Tasikmalaya. Pengurus dan anggotanya anak-anak muda progresif (tidak ada perempuannya).



beberapa aktifitas dan nama pengurusnya, saya ulangi pertanyaan tadi, jawabannya tetap “tidak”. Selang beberapa hari, saya berjumpa dengan kawan-kawan LKaHAM, sekalipun baru pertama kali bertemu, kutanyakan hal serupa kepada mereka tentang Nahdina³⁵, ternyata jawabannya sama, “tidak tahu banyak”. Akhirnya, pertanyaan kualihkan tentang Asper³⁶, jawabnya, “kenal, tahu, tapi bagaimana gitu?” Dari jawabannya itu terkesan, Asper belum melakukan aktifi-

tasnya secara maksimal. Hal serupa kutanyakan pada aktifis Asper di lain kesempatan. Mereka hanya berujar, “payah, mereka itu”.

Setelah 2 (dua) tahun kemudian, pada bulan kemarin (Mei), saya merasakan kawan-kawan telah berubah total. Saat itu, suasananya terasa akrab sekali dan nafas gerakannya tercium harum sekali. Mereka bersama-sama mengusung kajian Islam dan advokasi perempuan Tasikmalaya. Dari yang awalnya tidak

³⁵Nahdina: Komunitas Pesantren (Cipasung) yang menggeluti kajian Islam dan hak-hak perempuan. Anggota dan pengurusnya terdiri dari perempuan dan lelaki. Hampir semuanya tidak muda lagi.

³⁶Asper: Aspirasi Perempuan Tasikmalaya. Anggota dan Pengurusnya perempuan semua dan hampir semuanya mahasiswa perguruan tinggi, baik PT Islam maupun PT Umum.

kenal, ada rasa tidak percaya, dan sulit berkomunikasi, pada hari itu mereka benar-benar lain sekali. Bahkan, yang hadir tidak hanya tiga lembaga tersebut, tapi belasan organisasi atau kelompok strategis (*intermediary group*). Misalnya Persistri, Kohati, Fatayat NU, Muslimat NU, Komunitas Pesantren, PMII, CERDAS, BKSWI, WCC Cipasung, dsb. Selama dua hari, Rahima dan kawan-kawan sedang merumuskan *Strategic Planning* "Penguatan Hak-Hak Perempuan dalam Islam" di Asrama al-Muna- 2 PP Cipasung.

Irama yang sama juga terdengar di wilayah Priangan Timur lainnya, Garut. Yang tak kalah semangatnya lagi adalah wilayah Cianjur dan Banten. Ternyata, persoalan pemahaman Islam yang kritis, transformatif, dan sesuai dengan nilai-nilai universal masih cukup penting bagi kawan-kawan di berbagai daerah ini. Sama persis dengan pentingnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam Islam.

Yang masih perlu pendampingan lebih jauh adalah Banten. Misalnya, pada satu sisi setuju dengan pemahaman bahwa syari'at Islam (teks al-Qur'an, dst.) harus dibaca secara kontekstual dan substantif, bukan formal dan simbolis. Tetapi, ketika ditanya, "mengapa poligami dalam al-Qur'an dibolehkan?" Jawabnya, "sebe-

narnya tidak boleh, tapi kalau bisa adil ya silahkan". Setelah disanggah, "kok begitu? berarti boleh dong". Timpalnya, "ya, tidak boleh, karena belum tentu bisa adil".

Walhasil, untuk sebuah perubahan, waktu satu atau dua tahun memang belum cukup untuk menemukan indikator apakah sebuah gerakan berhasil atau tidak. Hj. Djuju butuh waktu minimal lima tahun.³⁷ Sebab, menerima dan menyampaikan gagasan Islam dan hak perempuan yang berbeda dengan lingkungan pesantrennya tidaklah semudah membalikkan tangan. Butuh kesadaran dan keberanian yang kuat serta *istiqamah* (konsisten).

Sebab, apa yang kita anggap sebagai perjuangan dan gerakan keadilan untuk umat manusia, belum tentu dianggap sama oleh yang lainnya. Karena itu kita perlu mengungkap pesan al-Qur'an Q.S. al-Maidah (4) : 8 dan an-Nahl : 90 ;³⁸

"Orang-orang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, sebagai saksi-saksi, karena Allah, dan janganlah kebencian orang kepadamu membuat kamu berlaku tidak adil. Berlakulah adil. Itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah maha tahu benar apa yang kamu kerjakan."

"Allah memerintahkan berbuat adil, mengerjakan amal kebaikan, bermurah hati kepada kerabat dan Ia melarang melakukan

³⁷Saat ini, Hj. Djuju, selain menjadi ketua Nahdina, juga kordinator Penguatan Jaringan Kajian Islam dan Advokasi Perempuan Tasikmalaya.

³⁸Ayat-ayat lain, kata yang sejenis atau semakna adalah *al-qisth* (keadilan) dan *al-mizan* (seimbang).

perbuatan keji, mungkar dan kekejaman. Ia mengajarkan kamu supaya menjadi peringatan bagimu”.

Oleh Yusuf Ali, ayat pertama tersebut dijelaskan, bahwa adil juga harus terjadi dalam suasana senang pada orang yang dibenci, paling tidak adalah tuntutan tentang kesadaran moral yang lebih tinggi.³⁹ Pada ayat selanjutnya, dikatakan bahwa keadilan adalah sebuah istilah yang menyeluruh, dan termasuk juga segala sifat hati yang bersih dan jujur. Tapi, agama menuntut lebih manusiawi lagi dalam melakukan kebajikan, sekalipun tidak diharuskan secara ketat oleh keadilan. Seperti, kejahatan dibalas dengan kebaikan, tapi lebih tepat dengan memenuhi segala tuntutan yang dibenarkan oleh kehidupan sosial.⁴⁰

Di sinilah, kita juga harus bersikap arif, bila ada yang menolak atau tidak setuju dengan gerakan perempuan dalam Islam. Contoh mutakhirnya, apa yang ditulis Yeni Rosdianti Rasio, di majalah *Sabili*, “Kala Isu Perempuan Jadi Komoditas”.⁴¹

Menurut saya, nampaknya, gerakan perempuan dalam Islam akan menemui lebih banyak kendala lagi. Sekurangnya, ada lima hal berikut yang perlu diperhatikan bagi para aktivis gerakan perempuan; *Pertama*, rumor bahwa gerakan

perempuan merupakan ‘proyek pesanan donor’ telah menjadi wacana publik. Pesantren yang selama ini dikesankan sebagai salah satu kelompok yang konservatif, tradisional, dan *jumud*, juga sudah mendengar dan membaca wacana tersebut. Oleh karena itu, bila mendapat informasi tentang pembaharuan Islam dalam masalah ini pesantren masih cukup rentan terhadap kesalahfahaman. Karena itu gerakan ini perlu hati-hati. Sebenarnya kehati-hatian ini tidak hanya di kalangan pesantren, termasuk juga kelompok atau orang-orang yang sepemikiran dengan Yeni di atas.

Kedua, kita seharusnya tidak perlu bosan, jenuh, atau merasa mengulang-ulang untuk mengadakan dialog, diskusi, dan semacamnya tentang hal ini. Jika ada dialog dan keterbukaan, tentunya orang semacam Yeni juga mungkin akan menyadari pentingnya gerakan tersebut. Sebab, gerakan perempuan semestinya harus menjadi kritik metodologis (*naqd manhaji*) dan *fi sabilil haq wa iqamatul haquq al-insaniyah* (penegakan hak asasi manusia).

Ketiga, sosialisasi dengan kajian kritis perlu dilakukan. Dibutuhkan tidak sekedar *counter* wacana tetapi juga kajian kritis atas persoalan perempuan yang benar-benar menjadi masalah yang dirasakan mereka agar terjadi *shifting paradigm* (perubahan paradigma). Ini agar

³⁹Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya, Juz I-XV*, terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 243.

⁴⁰*Ibid.* hlm. 680-681.

⁴¹*Sabili*, 22 Th. XI, 21 Mei 2004. Mengambil dari Kliping Rahima.

tidak menjadi *contra productive*. Maka isunya, bisa sekitar kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, dst.

Keempat, gerakan perempuan hendaknya menjadi bagian dari pekerjaan kemanusiaan (*humanity working*). Maka, selagi masih ada manusia yang merasa tidak adil, karena perempuan masih disisihkan, dinomorduakan dan dipolitisasikan, seyogyanya tetap terus ada yang bekerja agar muncul keadilan bagi manusia (perempuan dan lelaki). Bukan sekedar sesuatu yang parsial sifatnya seperti memenuhi kuota 30 persen perempuan di DPR.

Kelima, gerakan perempuan semestinya terus-menerus menjalin jaringan (*networking*) dengan kelompok-kelompok lainnya baik tingkat lokal, nasional ataupun internasional, seperti organisasi perempuan, kelompok agamawan, kelompok kepentingan dan kelompok strategis lainnya.

Sehingga, perubahan yang diharapkan akan secepatnya dapat terwujud. Apalagi, Priangan atau Sunda dalam beberapa tahun terakhir tengah mengumpulkan energinya demi meraih kembali tatanan sosial yang berkeadilan, baik sosial, politik ataupun budaya. Sehingga, antara pesan agama yang universal dengan tradisi dan budaya lokal bisa saling menjaga. Akhirnya, diharapkan gerakan perempuan dapat menjadi sarana pem-

baharuan Islam dan kemaslahatan bagi perempuan, khususnya. Budaya Sunda yang egaliter akan segera kembali diraih dalam kehidupan setiap hari, baik di ranah domestik ataupun publik.

Penutup

Sebagai catatan awal *action research*, analisis ini tentu masih membutuhkan ruang yang lebih luas⁴². Islam Priangan dalam konteks pribumisasi Islam, tentu saja terus berjalan seiring dengan dinamika sosial politiknya. Islam Priangan sesungguhnya membuka jalan tembus bagi gerakan perempuan: Ibarat rumus Pythagoras dalam ilmu matematika.

"*Ingsun titip tajug lan faqir miskin*", demikian wasiat populer dan populis Syeikh Syarif Hidayatullah. Bila boleh ditafsirkan, *tajug* (masjid) sebagai agama (*syari'at Islam*) dan *faqir miskin* sebagai yang tertindas, *mustadl'afin*, terutama kaum perempuan. Maka, bunyi wasiat Sunan Gunung Djati, "Saya titip agama dan kaum perempuan, yang tertindas". Artinya, jagalah syari'at Islam agar tidak menindas kaum perempuan.

Mengingat ajengan masih mempunyai tahta di tatar Pasundan (Priangan), maka pesan tersebut, hendaknya dijaga para ajengan agar syari'at Islam tidak dipolitisasi. Bukankah kekuasaan (*al-mulk*) yang sesungguhnya adalah milik Allah SWT.? ❖ *Wallahu a'lam*

⁴² Karena itu, kekurangan dan kesalahan menjadi tanggung jawab penulis.